

ABSTRAK

Permohonan dispensasi nikah meningkat dalam 2 periode tahun ini. Hal ini terjadi sejak kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia pelaksanaan perkawinan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur ini menjadi hal menarik dalam penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.BLA)”, tujuan penelitian mengetahui dampak dari berlakunya perubahan Undang-Undang perkawinan, faktor-faktor penyebab yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Blora.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut tidak dapat menurunkan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora, karena faktor penyebab diantaranya banyak kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa anak remaja adalah salah satu bentuk akibat pergaulan bebas. Dalam penetapan dispensasi nikah perkara nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Bla hakim melihat *masalah* dan *masalah* serta dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya. Solusi dari hal tersebut adalah pemerintah harus memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat serta diperlukannya peran orangtua dalam pengawasan serta harus memberikan pemahaman keagamaan sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari.

KATA KUNCI : Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi Nikah, Kabupaten Blora.

ABSTRACT

The request for marriage dispensation increased in 2 periods this year. This has happened since the policy of Law Number 16 of 2019 regarding the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning the age limit for implementing marriage. Judges' considerations in deciding cases and factors causing underage marriages are interesting in the research entitled "Judges' Considerations in Determining the Dispensation of Underage Marriages at the Blora Religious Court (Case Study of Determination Number 357 / Pdt.P / 2020 / PA.BLA) ", The research objective is to find out the impact of the enactment of the amendment to the Marriage Law, the factors that underlie the occurrence of underage marriage and the judge's consideration in determining the dispensation of marriage in the Blora Regency Religious Court.

In this study using descriptive analytical research specifications. is intended to provide as accurate a data as possible about a person, condition or particular phenomenon. The approach method used in this research is the juridical empirical approach, namely legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action at any particular legal event that occurs in society. Data analysis uses qualitative juridical methods, namely all data obtained in the inventory, thoroughly reviewed and researched, systematically and integrated to achieve clarity on the issues to be discussed.

The results of this study indicate that the enactment of the amendment to Law Number 16 of 2019 cannot reduce the number of applications for marriage dispensation in the Blora Religious Court, because the causative factors include many cases of extra-marital pregnancies that befell teenagers as a result of promiscuity. In determining the dispensation of marriage, case number 357 / Pdt.P / 2020 / PA, the judge looked at the maslahat and maslahah and took into account other legal grounds. The solution to this is that the government must provide information dissemination to the community and the need for the role of parents in supervision and must provide religious understanding so that underage marriage can be avoided.

KEY WORDS: *Underage Marriage, Marriage Dispensation, Blora Regency.*